Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Asal Dan Tujuan Kekuasaan: Implikasi Metafisis Tipologi Kepangeranan Menurut Machiavelli

Urbanus Ura Weruin[1], Vidyarto Nugroho[2], Herlina Budiono[3]
[1]Universitas Tarumanagara Jakarta, urbanusw@fe.untar.ac.id
[2]Universitas Tarumanagara Jakarta, vidyarton@fe.untar.ac.id
[3]Universitas Tarumanagara Jakarta, herlinab@fe.untar.ac.id

Abstrak

Dalam khazanah politik, pemikiran Machiavelli tidak hanya penting dan relevan pada zamannya melainkan juga sampai hari ini. Artikel hasil studi kepustakaan ini menguraikan tipe kepangeranan menurut Machiavelli dan implikasi metafisik kekuasaan. Dalam buku The Prince (Sang Pangeran) Machiavelli menguraikan tiga tipe kepangeranan berdasarkan asal atau sumber kekuasaan. Tipe-tipe tersebut adalah kepangeranan yang berdasarkan keturunan, kepangeranan yang direbut atau diciptakan (decreated), dan kepangeranan gerejawi. Kepangeranan yang diciptakan dimiliki oleh warga negara yang memiliki kemampuan handal atau karena nasib mujur. Namun pangeran yang memiliki kemampuan (prowess) jauh lebih handal jika dibandingkan dengan pangeran yang menjadi pangeran karena nasib mujur (fortune). Nasib mujur adalah bahan untuk membentuk kekuasaan. Kepangeranan gerejawi dikelola oleh lembaga religius yang kuat dan berwibawa tanpa peduli pada sikap dan cara hidup rakyat. Kekuasaan gerejawi tidak perlu dipertahankan karena tidak akan direbut. Asumsi metafisis kekuasaan dari tipologi kepengeranan Machiavelli adalah bahwa realitas politik bukanlah suatu realitas 'ideal' sebagaimana dibayangkan Plato sebagai realitas yang abadi, kekal, sempurna, dan tak berubah melainkan suatu realitas yang dibangun atas dasar kebutuhan real-pragmatis kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan itu kontingen; perlu dirawat dengan belajar dari pada pendahulu; membangun 'citra'; lebih baik ditakuti dari pada dicintai; berorientasi pada kepentingan praktis-pragmatis kekuasaan.

Kata Kunci: *Machiavelli, kekuasaan, tipologi kepangeranan, implikasi metafisis*

Abstract

In the realm of politics and business, Machiavelli's thoughts are not only important but also always relevant for rulers or leaders, not only in his time but also to this day. This article, the result of a literature study, outlines the types of princedoms according to Machiavelli and the metaphysical implications of power. In his book, The Prince, Machiavelli outlines three types of princedoms based on the origin or source of power. These types are hereditary princedoms, decreated princedoms, and ecclesiastical princedoms. Created princedoms are held by citizens with reliable abilities or by luck. However, princes with ability (prowess) are far more reliable than princes who become princes by luck. Luck is the material for shaping power. Ecclesiastical princedoms are managed by strong and authoritative religious institutions without regard for the attitudes and lifestyles of the people. Ecclesiastical power does not need to be maintained because it will not be seized. The metaphysical assumption of power from Machiavelli's typology of kingship is that political reality is not an 'ideal' reality as Plato imagined as an eternal, eternal, perfect, and unchanging reality, but rather a reality built on the basis of existing real-pragmatic needs. Machiavelli teaches that power is contingent; needs to be maintained by learning from predecessors; building an 'image'; it is better to be feared than loved; oriented towards the practical-pragmatic interests of power.

Keywords: *Machiavelli, power, typology of principalities, metaphysical implications*

Corresponding Author:
Urbanus Ura Weruin
Universitas Tarumanagara Jakarta, urbanusw@fe.untar.ac.id

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Perang antara Israel-Amerika Serikat (AS) versus Iran hari-hari ini mengingatkan kita satu hal bahwa karakter pemimpin, kekuasaan politik, penguasaan teknologi peperangan, dan ketamakan ekonomi, tak pernah tidur pulas. Kekuasaan itu menggeliat, penuh intrik, deterministik, membunuh, dan menghancurkan. Di tanah air berkembang isu politik dinasti beberapa waktu lalu. Semunya tentang kekuasaan. Bagaimana merebut, mempertahankan, dan menata kekuasaan. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana memahami wajah kekuasaan hari ini?

Dalam khazanah teori politik modern, pemikiran Machiavelli merupakan salah satu tonggak utama yang menjelaskan asal mula, intrik, karakter, dan tujuan akhir kekuasaan. Pengaruh pemikiran Machiavelli tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan dikelola masih relevan sampai hari ini (Chanda, 2025). Meskipun menulis di era Pencerahan dan berpengaruh pada hampir lima abad yang lampau, pemikiran politik Machiavelli tetap membantu memahami gejolak dan dinamika politik masa kini. Žagar (2021) menyebut era politik sekarang sebagai "*New Rome*" untuk menunjukkan kontekstualitas pemikiran politik Machiavelli. Biba dan Franěk (2023) menyatakan bahwa meskipun interpretasi tehadap pemikiran Machiavelli sangat beragam, satu hal yang pasti adalah bahwa Machiavelli merupakan pioner politik sesungguhnya. Pemikirannya tidak hanya orisinal melainkan juga memantik banyak diskusi tajam tentang kekuasaan politik. Pemikiran Machiavelli tentang bagaimana negara memperlakukan kekuasaan, kemuliaan, kepentingan, warga negara, agama, moralitas, dan kebajikan merupakan sumbangan penting dan tak ternilai untuk memahami gejolak politik (Sayer, 2026). Ménissier (2025) menulis, *"...he emphasized the role of power in affairs of state—what he thought about religion, morality and their relation to politics are still some of the most contentious questions about his writings*". Bahkan pemikiran Machiavelli dianggap membantu memahami dan memberantas korupsi dalam tubuh pemerintahan (Žagar, 2021; Ménissier, 2025).

Jan Bíba dan Jakub Franěk (2023) menyatakan bahwa Niccolò Machiavelli menempati poisisi sentral dalam sejarah pemikiran politik. Ia boleh dianggap sebagai guru kejahatan, subversif, totalitarian, dan penentang demokrasi. Machiavelli juga dianggap sebagai pemikir politik pertama yang menemukan *value-free political analysis*, seorang fasis. Tetapi yang pasti, label tersebut dan signifikansi pemikiran Machiavelli merupakan hasil beragam interpretasi untuk menyeret pemikiran politik Machiavelli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem politik yang dihadapi (Bíba dan Franěk, 2023). Jan Bíba dan Jakub Franěk (2023) menulis, "*In other words, we suggest that how we read Machiavelli today reveals much about us, our political predicament and our concerns*".

Bagi Machiavelli, untuk mencermati perubahan konstelasi politik global dan lokal yang terus bergejolak, semakin kompleks, dan dinamis, yang dibutuhkan bukanlah seorang pemimpin karismatik, moralis, dan religius melainkan seorang pemimpin yang realis, praktis, efektif, dan bahkan oportunis. Dalam dua karya termasyur, *The Prince* dan *Discourse to Livy*, Machiavelli menjelaskan tentang takdir, kekuasaan, dan kepentingan. Demi merebut dan mempertahankan kekuasaan, musuh-musuh eksternal dan internal mesti dilumpuhkan dengan berbagai cara yang cerdas, efektif, bahkan juga licik.

Artikel hasil studi kepustakaan ini tidak menguraikan seluruh nasihat politik Machiavelli tentang kekuasaan, hubungan antara politik dan moralitas, atau memberikan sebuah penilaian moral terhadap pemikiran politik Machiavelli dari sudut pandangan etis. Artikel ini, secara khusus, mencermati tiga tipe kepangeranan (penguasa) menurut Machiavelli, karakter dan sikap penguasa, serta implikasinya dalam memahami kekuasaan politik dan ekonomi, yang diuraikan Machiavelli dalam buku *The Prince.*

Tujuan utama *The Prince* adalah untuk menunjukkan kepada penguasa atau yang akan menjadi penguasa bagaimana sebaiknya mempertahankan kekuasaan dan negara agar aman dan makmur di tengah kekacauan politik di Italia pada awal abad 16 sekaligus menyelamatkan dirinya sendiri di mata penguasa Florence Lorenso di Piero de Medici (Putera Piero de Medici dan cucu Lorenso the Magnificent). Menurut Machiavelli, guna

melanggengkan kekuasaan, seorang penguasa harus mengambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang unethical dan immoral sekalipun, guna mengontrol dan memaksimalisasi keamanan dan kesejahteraan negara. Dalam rangka itu seorang penguasa mungkin harus berdusta, menipu, tidak mengumbar janji, dan sebagainya, guna menyelamatkan kekuasaan sambil mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan mulia ini bisa ditempuh dengan cara yang menurut mata orang lain tidak mulia (tujuan menghalalkan cara). Namun prinsip ini dirumuskan Machiavelli berdasarkan observasinya terhadap situasi korup yang meliliti kekuasaan pada zamannya. Maka politik mungkin dapat dilihat bukan sebagai profesi yang bersih (tainted profession). Ruang publik adalah daerah bekerjanya para setan (devil). Hidup dan bertahan dalam ruang ini, mungkin perlu menggunakan taktik-taktik para setan. Machiavelli adalah seorang realis, bahkan oportunis. Machiavelli menulis, "To survive in the city hall, one had to adopt the tactics of the devil. This is the way it is in the real world. If you want to succees in the real-world, use real-waorld strategies" (Machiavelli, 1974). Apa sesungguhnya kekuasaan itu dan bagaimana seorang penguasa harus bersikap? Artikel hasil studi kepustakaan dengan menggunakan metode content analysis ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan dengan menggunakan metode content analysis. Data sekunder berupa ide. gagasan, dan analisis pemikiran Machiavelli yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, atau opini yang berhasil dikumpulkan merupakan sumber utama penelitian ini. Dengan memasukan key words seperti "pemikiran politik Machiavelli" dalam platform google searching, maka akan muncul berbagai ide, gagasan, dan opini tentang pemikiran politik Machiavelli dalam berbagai buku atau jurnal-jurnal ilmiah. Berdasarkan catatan-catatan pemikiran yang tertuang dalam buku-buku dan artikel-artikel tersebut, kemudian dilakukan pembaaan mendalam dan klasifikasi gagasan-gagasan mana yang relevan dengan pemikiran politik Machiavelli. Hasil penelitian ini berupa sintesis kreatif atas ide-ide atau gagasan-gagasan Machiavelli tentang politik; khususnya tentang karakter penguasa, sikap-sikap yang perlu dimiliki seorang penguasa agar efektif, efisien, dan strategis dalam merebut, menata, mempertahankan, bahkan memperluas kekuasaan.

Selain sebagai praktisi politik, Machiavelli adalah seorang filsuf politik. Membaca karya Machiavelli tentang politik kekuasaan, perlu menggunakan analisis konseptual khas filsafati. Ross (2011) menyatakan bahwa analisis filsafati dilakukan dengan 'reasoning and arguing, detecting fallacies/nonsense, distinguishing the apriori from the aposteriori, conceptual analysis" (Ross, 2011). Singkatnya, metode penelitian khas filsafati tidak lain dari conceptual analysis and justification (Ross, 2011). Josh (2016) menyebut metode penelitian filsafat sebagai 'higher-order' reading. Hasil pembacaan atau analisis konseptual secara filsafati adalah sebuah pemahaman yang memadai dan mendalam atas makna dan kebenaran 'a priori' dengan terpenuhinya kondisi-kondisi mutlak sebuah teori ilmiah (Eder, Lawler, van Riel, 2020). Smith dan Small (2017) menyatakan bahwa metode filsafati itu tidak lain dari "the analysis, clarification, and criticism of the language, concepts, and logic of the ends and means of human experience". Melalui analisis, ide-ide atau konsep-konsep yang kompleks dapat dipilah, dilihat hubungan logis antar ide, dapat dipahami makna terdalam yang terkandung di dalamnya. "In analysis, one reduces complex ideas or explicates human situations into understandable, relational concepts. Through analysis essential concepts that drive practice are extracted… so that they may be more easily understood and debated. Closely related to analysis is clarification… Philosophers have… to challenge and ultimately clarify those constructs we use to make sense of the world; constructs often taken for granted" (Sheffield, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Kepangeranan

Dalam buku *The Prince*, Machiavelli menguraikan tiga tipe kepangeranan berdasarkan asal usul atau sumber kekuasaan. Tipe-tipe tersebut adalah kekuasaan/kepangeranan yang berdasarkan keturunan (warisan) dan kepangeranan yang direbut atau diciptakan (*decreated*). Kepangeranan yang diciptakan ini, bisa raja atau bisa juga warga negara biasa tetapi memiliki kemampuan yang handal (Hiiero dari Syracuse) atau karena nasib mujur (Musa, Cyrus, Romulus) (sebagai peluang). Namun pangeran yang memiliki kemampuan (*prowess*) jauh lebih handal jika dibandingkan dengan pengeran yang menjadi pangeran karena nasib mujur (*fortune*). Nasib mujur merupakan materi kekuasaan. Sementara kemampuan pangeran dalam membentuk atau mengelola kekuasaan merupakan forma kekuasaan (Machiavelli, 1974; 1999). Machiavelli menulis, "And when we come to examine their actions and lives, they do not seem to have had from fortune anything other than opportunity. Fortune, as it were, provided the matter but they gave it its form; without opportunity their prowess would had been extinguished, and without such prowess the opportunity would have come in vain" (Machiavelli, 1974).

Di samping itu, Machiavelli juga menyebut kepangeranan Gerejawi dalam negara-negara gerejani. Kepangeranan ini dikelola oleh lembaga religius yang kuat dan berwibawa tanpa peduli pada sikap dan cara hidup rakyat. Kekuasaan mereka tidak perlu dipertahankan karena tidak akan direbut. Negara model ini termasyur dan dipimpin oleh Allah sehingga menurut Machiavelli hanya orang-orang sombong yang berani membahas kepangeran ini. Karena menurut Machiavelli kekuasaan dan kebesaran gerejawi tidak hanya menjalankan legitimasi spiritual melainkan juga sangat ditakuti.

Cara-Cara Mempertahankan Kekuasaan

Lebih lanjut, Machiavelli menguraikan cara-cara untuk menata dan mempertahankan kekuasaan. Di antara cara-cara tersebut, antara lain:

a. Bersahabat dengan rakyat: rakyat biasa (tidak dengan jalan kekejaman) bisa menjadi penguasa kalau diangkat oleh bangsawan atau rakyat. Penguasa tipe ini harus mempertahankan persahabatan dengan mengambil hati dan tidak menindas rakyat. Machiavelli menulis, "I shall only conclude that it is necessary for a price to have the friendship of the people; otherwise he has no remedy in times of adversity" (Machiavelli, 1974).
b. Berlaku kejam bila diperlukan (Machiavelli, 1974). Machiavelli (1974) menulis, "The two I have in mind are when a man becomes prince by some criminal and nefarious method, and when a private citizen becomes prince of his native city with the approval of his fellow citizens". Agatocles misalnya bertindak seperti seorang penjahat dengan watak yang berani dan fisik yang kuat dengan membunuh senator-senator untuk menghindari musuh dalam selimut. Ia menantang kesulitan dan bahaya. Tetapi menurut Machiavelli, persoalannya adalah apakah kekejaman itu digunakan secara baik atau tidak. Kita dapat mengatakan bahwa kejahatan digunakan dengan baik yakni demi keselamatan rakyat diperkenankan. Kejahatan yang digunakan untuk sesuatu yang buruk adalah kejahatan. Sebaliknya prilaku yang kejam demi kebaikan merupakan sebuah taktik atau strategi kekuasaan.
c. Menjaga stabilitas. Menurut Machiavelli, mengubah undang-undang dapat menciptakan instabilitas. Pembaharuan bisa menciptakan musuh dan utopia (belum teruji melalui pengalaman). Rakyat pun pada dasarnya mudah berubah sikap. Rakyat bisa dipaksa dengan menggunakan senjata. Karena pengalaman menunjukkan, "Nabi yang bersenjata berhasil menaklukan dan nabi tanpa senjata mengalami kekecewaan" (Machiavelli, 1999). Perubahan dalam menata kekuasaan sedapat mungkin tidak mendatangkan instabilitas.
d. Untuk wilayah yang baru direbut: ada tiga cara mempertahankan kekuasaan, yakni 1) menghancurkannya, 2) secara pribadi bermukim di wilayah tersebut, dan 3) mendirikan oligarki yang menjami agar negara itu tetap bersahabat. Machiavelli mengatakan, "…barang siapa mengusahakan orang lain memegang kekuasaan, ia menghancurkan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dirinya sendiri, karena kekuasaan itu dibangun entah dengan tipu muslihat entah dengan paksa dan kedua hal itulah yang menimbulkan kecurigaan pada orang yang telah menjadi berkuasa" (Machiavelli, 1999). "Kalau keluarga raja sudah ditumpas sama sekali, tidak perlu lagi merasa khawatir, karena orang lain tidak disegani rakyat" (Machiavelli, 1999).

Karakteristik Sikap Penguasa

Keberhasilan kekuasaan ditentukan oleh karakter yang dibangun seorang penguasa. Pikiran, orientasi, dan tindakan penguasa menentukan keberhasilan kekuasaan. Sikap-sikap yang perlu dipupuk, dipertahankan, dan dikembangkan adalah:

1. Gagah, berani, dan ambisius. Seoang penguasa yang berhasil perlu memiliki sikap gagah, berani, dan ambisius, seperti Alexander Agung. Ia tidak perlu tunduk dan takut pada kekuatan apa pun di luar dirinya. Yang diperlukan adalah fokus pada visi, tujuan, dan kepentingan kekuasaan itu sendiri. Seorang penguasa yang berhasil merupakan seorang penguasa yang ambisius dan tegas.
2. Bijaksana. Menurut Machiavelli, seorang penguasa yang sukses harus belajar dari sejarah. Seorang penguasa tidak hanya menghargai tradisi melainkan juga menuruti para pendahulu di masa lalu (Machiavelli, 1974). Machiavelli menulis, "men nearly always follow the tracs made by others and proceed in theirs affairs by imitation even though they can not entirely keep the tracs of the others or emulate the prowess of their models. So a prudent man should allways follow in the footsteps of great men and imitate those who have been outstanding" (Machiavelli, 1974).
3. Otonom. Seorang penguasa sejati harus mandiri dalam segala situasi, terutama dalam keadaan bahaya. Sikap selalu meminta bantuan atau mengandalkan pihak asing melemahkan kekuasaan dari luar dan dari dalam (Machiavelli, 1974). Agar tetap mandiri dan otonom, seorang penguasa harus memiliki angkatan perang yang besar dan kuat. Raja yang bijaksana selalu menghindari pasukan bantuan dan menggunakan pasukan tentaranya sendiri. Penguasa yang otonom lebih suka kalah perang dengan pasukannya sendiri dari pada menang dengan bantuan orang lain.
4. Kikir. Menurut Machiavelli, seorang penguasa harus bersikap kikir. Ia tidak perlu menebar kebaikan demi membangun citranya sebagai orang baik. Seorang penguasa yang bersikap murah hati supaya namanya harum dan dikenal luas tidak produktif dalam menata kekuasaan. Machiavelli bahkan menganjurkan agar seorang penguasa harus secara mencolok bertindak boros dan dengan demikian menarik pajak tinggi untuk membiayai prilakunya, dan akibatnya ia dibenci oleh rakyatnya. Bermurah hati tidak membuat seorang raja dibenci rakyat karena merampok rakyat. Seorang penguasa perlu menimbun harta jika harta tersebut bukan miliknya, milik orang lain, atau harta yang berasal dari jarahan.
5. Dihormati karena belas kasih dari pada bersikap kejam. Tetapi di sisi yang lain, Machiavelli menganjurkan agar seorang penguasa sebaiknya dihormati karena bersikap berbelas kasih dari pada bersikap kejam. Kekejaman yang dilakukan seorang penguasa demi mempersatukan dan membuat rakyat setia, meskpun dikecam, didak perlu dikhawatirkan (Machiavelli, 1974).
6. Dicintai dan ditakuti. Kekuasaan selalu mengandung paradoks. Seorang penguasa tidak dapat menyenangkan semua orang. Ia dicintai tetapi sekaligus dibenci; disegani tetapi sekaligus diakrabi; dihormati tetapi sekaligus dicela. Paradoks ini kelihatannya sulit dipertemukan. Tetapi, jika harus memilih, menurut Machiavelli, lebih baik dibenci dari pada dicintai; lebih baik disegani daripada diakrabi; lebih baik ditakuti dari pada dihormati. Menurut Machiavelli, seorang penguasa harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa, sehingga kalaupun ia tidak dicintai rakyatnya, setidaknya ia tidak dibenci. Kalau ia dicintai oleh rakyatnya karena berusaha memuaskan dan membahagiakan mereka, ia tidak perlu khawatir terhadap pembangkangan mereka (Machiavelli, 1974). Seorang penguasa baru, menurut Machiavelli, perlu menguasai cara-cara memerankan sifat rubah yang licik dan singa yang ganas, dihormati dan ditakuti.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

7. Taktis. Menurut Machiavelli, mesti mempertimbangkan hal-hal strategis dan memutuskan secara tepat dan efektif pilihan kebijakan tertentu. Kadang-kadang musuh dapat diciptakan untuk menunjukkan kepahlawanan dan kekuatan seorang penguasa. Karena bagi Machiavelli, mahkota dan keagungan seorang penguasa bergantung pada keberhasilan mengatasi kesulitan dan perlawanan. Maka kesulitan atau musuh, entah riil atau tidak, sengaja diciptakan untuk mendemonstrasikan kekuatan kekuasaan.
8. Kejam. Seorang penguasa tak perlu ragu atas kekejaman yang diperlukan untuk merawat kekuasaan. "Orang, entah harus disayangi atau ditumpas sama sekali; mereka akan membalas dendam atas penderitaan kecil yang mereka tanggung; tetapi mereka tidak dapat membalas dendam atas penderitaan-penderitaan besar" (Machiavelli, 1999). Karena itu penderitaan yang kita timpakan pada seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu khawatir akan pembalasan dendamnya.
9. Visioner. Seorang penguasa yang bijaksana tidak hanya mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada sekarang melainkan juga memproyeksikan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul di masa depan dan mencegahnya dengan seksama. Ibarat penyakit yang baru muncul, akan mudah disembuhkan meskipun sulit didiagnosa. Tetapi jika tidak diobati dan didiagnosa sejak awal, penyakitnya akan mudah didiagnosa tetapi sulit disembuhkan. Dalam politik, kekacauan politik dapat dengan mudah disembuhkan jika diketahui penyebabnya. Mencegah lebih baik dari pada menyembuhkan. Seorang panguasa yang visioner harus membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang dan mengidentifikasi ancaman terhadap kekuasaan.
10. Realistis. Melalui buku The Prince, Machiavelli merumuskan nasihat-nasihat politik kepada para penguasa berdasarkan pengalaman riil dan sesungguhnya dari kenyataan politik. Visi politik Machiavelli bukan dirumuskan dari ide, teori, atau gagasan politik sebagaimana dipikirkan atau dibayangkan seorang penguasa melainkan dari praktik dan pengalaman politiknya sendiri. Jurang antara kenyataan politik dan pemikiran politik terlalu lebar. Dalam praktik kehidupan politik, orang yang ingin bertindak secara terhormat akan kecewa karena begitu banyak orang yang tidak begitu ksatria. "Karena itu kalau seorang raja ingin mempertahankan pemerintahannya, ia harus mempelajari bagaimana bertindak secara tidak ksatria dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan" (Machiavelli, 1999). Semua sikap baik dan buruk ada pada manusia, termasuk raja. Raja yang bijaksana menghindari prilaku-prilaku buruk untuk menghindari kehancuran negara. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, ia tidak perlu khawatir terhadap tuduhan melakukan kejahatan, kalau kejahatan itu diperlukan demi keselamatan negara (keamanan dan kemakmuran). Karena tindakan yang nampak baik pun bisa berakibat buruk.

Pengandaian Metafisis Politik

Jika Machiavelli menganjurkan agar seorang penguasa meniru para pendahulunya, maka kita bisa mengatakan bahwa bagi Machiavelli, realitas politik bukanlah suatu realitas 'ideal' sebagaimana yang dibayangkan Plato sebagai realitas yang abadi, kekal, sempurna, dan tak berubah, melainkan suatu realitas yang dibangun atas dasar kebutuhan real kekuasaan. Tidak ada 'realitas idea' ala Plato. Yang ada adalah yang ada bukan sesuatu yang ada dibalik yang ada. Tidak ada realitas di balik realitas.

Namun kesimpulan ini pun menjadi sulit apabila kedermawan penguasa dianggap sebagai upaya untuk membangun citra. Citra adalah semacam gambaran atau image yang diciptakan melalui kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan politis seperti memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Realitas citraan" memang memiliki referensi pada dunia nyata tetapi sekalgus menjauhkan diri dari kenyataan. Baudrillard misalnya menyatakan bahwa citra memiliki beberapa wajah. Pertama, citra merepresentasikan realitas; kedua, citra menyembunyikan realitas; dan ketiga, citra menciptakan realitas. Jika kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan politik dianggap sebagai politik citra, maka realitas citraan ini bisa dianggap sebagai realitas semu.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Secara metafisik, realitas politik bukanlah suatu substansi ontologis yang memiliki akar-akar moral yang abadi, kuat, dan mendalam melainkan suatu kepentingan-kepentingan praktis-pragmatis kekuasaan. Kekuasaan bukanlah suatu panggilan Yang Ilahi melainkan sebuah taktik dan strategi untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan yang selalu berubah berdasarkan kondisi dan kebutuhan. Realitas politik merupakan realitas kontingen, bukanlah realitas yang tetap, abadi, dan absolut. Kontingensi politik ditentukan oleh kepentingan. Karena dalam peolitik masih berlaku pandangan, "tidak ada kawan atau musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan". Dengan menunjukkan asal atau sumber kekuasaan/kepangeranan sebagai sesuatu yang direbut, dibentuk, ciptakan, kita dapat memahami asumsi di balik kenyataan politik; bahwa politik tak pernah tidur pulas. Ia tidak pernah statis. Politik bukan sekedar sebuah potensi melainkan terutama sebuah aktus. Politik itu selalu dinamis. Membangun atau menghancurkan, bergerak maju atau mundur; berkembang atau stagnan. Realitas politik merupakan realitas yang selalu 'menjadi'; tanpa henti; sebuah energi dinamis yang bergerak dari potensi ke aktus. Dan aktus itu pada gilirannya, melaui internalisasi, memengaruhi strategi.

Dalam The Prince dan Discourses on Livy, tampak jelas bahwa Machiavelli menolak tujuan transendal, moral dan ilahi kekuasaan. Sebaliknya Machiavelli menegaskan visi tentang imanensi, realistik, dan dinamisme politik. Politik tak bisa lain dari strategi memperoleh, menata, memelihara, dan memperluas kekuasaan. Machiavelli tidak hanya memisahkan politik (negara) dari agama, melainkan juga menekankan imanensi, materialitas, dan instrumentalitas kekuasaan. Ide ini dapat dipahami karena agama sekalipun dapat menjadi alat politik untuk meraih kekuasaan. Dalam praktik agama dapat diperalat untuk memperoleh, memelihara, dan memperluas kekuasaan. Pemimpin yang bijaksana bagi Machiavelli bukan seperti bejana rohani yang mampu menampung kekuatan ilahi dalam kekuasaannya dan kemudian mendistribusikannya dalam kebijakan-kebijakan poltik melainkan kemampuan menangkap, menciptakan, mengelola, beradapatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang dialami.

Nilai-nilai moral (moralitas politik) bukanlah suatu kebenaran abadi dan absolut melainkan relatif, berubah, dan berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, dan dari satu periode ke periode yang lain dalam sejarah. Suatu kenyataan disebut kenyataan politik (dan bukan kenyataan lain) kalau ia melekat pada kepentingan banyak orang (penguasa, rakyat, pihak luar). Kekuasaan adalah kenyataan politik karena berkaitan langsung dengan kepentingan berbagai pihak. Abellanosa (2019) menyebut Mavhiavelli sebagai politisi unggul. politisi yang melampaui politik, post-politics, sebuah model politik yang membumikan praksis atau kenyataan. Poltik bukan tentang sebuah teori moral, etika, dan moralitas. Menurut Abellanosa (2019) Machiavelli seorang arsitek politik yang secara jujur dan terbuka mengungkapkan cetak biru kejahatan praktisi politik baik yang terlibat langsung maupun sekedar berangan-angan. Bagi Machiavelli, konflik, instabilitas, dan kekejaman dalam politik tak dapat dihindari. Konflik, instabilitas, dan kekejaman dapat menjadi jalan masuk untuk memperkuat kekuasaan negara. Konflik dan kekejaman dilihat sebagai hal yang produktif. Politik bergerak dalam ruang siklis. Bergerak melalui siklus pertumbuhan dan kemunduran, memberikan hukum umum perilaku politik yang memungkinkan para pemimpin untuk belajar dari masa lalu.

Bagi Machiavelli, perubahan, dinamika. instabilitas, kekejaman, dan kejahatan politik bersumber dari perspektif Machiavelli tentang dunia dan manusia. Dunia bukanlah panggung yang statis, stabil, dan stagnan melainkan dinamis, berubah, dan tak teratur. Manusia bukanlah makhluk yang seluruh hidupnya ditentukan oleh takdir yang given, melainkan dinamis, produktif, dan berubah. Machiavelli mengasumsikan dunia yang kacau yang didorong oleh sifat manusia yang egois dan keberuntungan yang berubah-ubah, yang hanya dapat dikelola melalui fokus realistis pada kekuasaan (virtù) dan keberlangsungan negara (raison d'état).

Jelas bahwa, bagi Machiavelli, dunia kehidupan merupakan kenyataan sekular, manusiawi, dan dinamis; bukan sebuah kenyataan ideal, spiritual dan rohani. Aktivitas politik

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bertumpuh pada proses strategis yang efektif dan efisien untuk mencapai kekuasaan yang bebas, otonom, dan independen. Proses dan aktivitas politik memiliki hukum dan aturannya sendiri; terlepas dari aturan moral dan religius. Berbeda dari pandangan politik Abad Pertengahan yang memahami politik sebagai bagian dari 'penyelenggaraan Ilahi' yang sepenuhnya tunduk pada hukum-hukum moral alamiah dan religius. Bagi Machiavelli, politik sepenuhnya merupakan urusan duniawi yang berkaitan dengan kekuasaan, wilayah, dan stabilitas yang nyata, bukan tatanan ilahi.

Secara metafisis, Machiavelli menekankan realisme politik kekuasaan dari pada idealisme politik. Bagi Machiavelli, kekuasaan politik bukan bergelut dengan 'apa yang seharusnya terjadi' melainkan 'apa yang senyatanya terjadi", 'kebenaran faktual yang efektif', 'apa adanya'. Bahwa dalam politik, semua kelompok memperjuangkan kepentingannya sendiri, plin-plan, tidak tahu berterima kasih, dan didorong oleh nafsu kekuasaan, sehingga membutuhkan penguasa yang kuat, terkadang kejam, untuk menjaga ketertiban. Kekuasaan politik dianggap independen yang menghidupi logikanya sendiri. Semua tindakan politik pada akhirnya menyasar ketertiban, stabilitas, kepatuhan, dan keberlanjutan kekuasaan dari pada mengabdi pada tujuan moral. Kehidupan politik adalah pertarungan antara fortuna (keberuntungan/kesempatan/hal yang tidak terduga) dan Virtù (energi, kecerdasan, dan keberanian pemimpin). Seorang pemimpin harus beradaptasi dengan "tuntutan zaman" agar berhasil.

Multitafsir

Harus diakui bahwa perspektif tentang kekuasaan dan karakteristik penguasa menurut Machiavelli, tidak tunggal melainkan plural. Kelts (2023) menyatakan bahwa pemikiran politik Niccolo Machiavelli sering dianggap seperti dua sisi dari kepingan mata uang yang sama. Di satu sisi ia dianggap sebagai penasihat para tiran yang kejam. Tetapi di sisi yang lain Machiavelli dianggap sebagai seorang humanis, patriotik, cinta pada kebebasan, kepedulian yang tulus kepada negara, dan kemanusiaan (Kelts, 2023). Menurut Kelts (2023) sisi humanisme ini yang luput dari interpretasi historis kehidupan Machiavelli. Pemikiran Machiavelli mengakhiri kekhawatiran dominasi politik institusional Romawi pada zamannya. Realisme politik Machiavelli dianggap berwawasan humanistik (Kelts, 2023).

Grazziero (2022) menyatakan bahwa pemikiran politik Machiavelli dirumuskan dari pengalaman orisinilnya dengan kekuasaan. Kekerasan terang-terangan, pengkhianatan politik, dan pergolakan sosial yang harus dihadapi Machiavelli membuatnya berpikir tentang eksistensi negara dan penguasa. Machiavelli ingin kembali ke 'kebenaran sejati' yang disampaikan melalui pengalaman, berbeda dengan kecenderungan tradisional terhadap spekulasi mengenai 'hal-hal imajiner', terutama dengan menggambarkan karakter-karakter fantastis dan merancang rezim politik yang hanya dapat ada di atas kertas (Grazziero, 2022). Gagasan politik dalam The Prince menjadi pengingat penuh warna tentang pandangan Machiavelli tentang apa yang mampu dilakukan manusia dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya. Dalam hubungan antar manusia, tidak ada yang namanya terlalu bodoh untuk menjadi jahat, pemarah, serakah, egois, berkhianat. Politisi terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Tidak heran kalau Machiavelli kemudian menawarkan beberapa nasihat aneh mengenai karakter penguasa, sikap pemimpin, dan strategi dalam pengelolaan negara dan pengendalian sosial.

Patut dipahami bahwa bagi Machiavelli, menikmati reputasi yang sangat baik adalah satu hal dan menjadi benar adalah hal lain. Ketika keduanya bertentangan, Machiavelli mendesak siapa pun yang menjalankan pemerintahan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip moral dan menerima tindakan apa pun yang membuatnya unggul dari pesaing. Dengan kata lain, untuk semua tujuan praktis, politik yang baik dan etika yang buruk jauh lebih cocok daripada sebaliknya. Bahkan, menganggap gagasan moral seseorang sebagai realitas politik adalah resep kegagalan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Jadi, sejauh menyangkut Machiavelli, masalah sebenarnya bukanlah apakah seseorang harus mengotori tangannya atau tidak, karena tidak ada orang yang waras akan menjaga tangannya tetap bersih ketika situasi membutuhkan tindakan ekstrem. Karena hal itu tidak dapat dihindari, satu-satunya masalah yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana menghindari praktik-praktik yang dipertanyakan seperti pengkhianatan, pembunuhan, dan kekejaman (tiga contoh yang Machiavelli anggap sebagai bagian dari proses politik). Meskipun sebagian besar orang tidak terlalu peduli dengan cara penguasa memberikan kedamaian dan keamanan yang wajar, aturan emas Machiavelli telah disambut dengan sejumlah kecurigaan. Seorang penguasa perlu merancang cara untuk menghindari dibenci dan dihina. Ia harus meminta orang lain untuk mendukung dan menegakkan kebijakan yang tidak popular. Memutuskan dan melakukan pada waktu yang tepat dan penipuan yang cermat merupakan salah satu kuncinya (Grazziero, 2022).

Kekerasan harus dibalas dengan lebih banyak kekerasan dan kelicikan dengan lebih banyak kelicikan. Sopan santun dalam politik sering hanya sekedar kamuflase moral. Etika, sopan santun, dan dicintai berguna dalam politik. Tetapi ia tidak pernah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Machiavelli menekankan berpolitik yang benar; bukan berpolitik yang baik. Kekejaman, kekerasan, tipu muslihat, dalam politik dapat menjadi sarana efektif kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah kejelian menggunakannya pada situasi yang tepat (Grazziero, 2022).

KESIMPULAN

Bagi Machiavelli, kekuasaan politik perlu dikelola berdasarkan kebutuhan real-pragmatis; bukan kebutuhan ideal-teoretis. Seorang penguasa perlu memperhitungkan penggunaan kekerasan bila diperlukan; menjaga stabilitas; dekat dengan rakyat; dan tetap mempertahankan pengaruh di tengah masyarakat. Untuk itu seorang penguasa perlu bersikap gagah, berani, ambisius, otonom, bijaksana kikir, belas kasih, taktis, dicintai tetapi sekaligus juga ditakuti. Ia tidak hanya berlaku kejam apabila diperlukan melainkan juga visioner dan realistis. Dengan nasihat-nasihat politik semacam ini, bagi Machiavelli, substansi sesungguhnya kekuasaan, bukanlah sebuah panggilan moral demi pelayanan kepada masyarakat melainkan sebuah intrik, strategi, taktik, dan kebijakan yang dinamis, dan kontekstual. Kekuasaan bukan sekedar soal membangun citra atau gambaran positif penguasa di mata rakyat melainkan soal cara apa pun yang perlu ditempuh penguasa untuk meraih, menata, dan mempertahankan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abellanosa, R. & John S. (2019). Niccolo Machiavelli and the Possibility of the Post-political, *PHAVISMINDA Journal*, Volume 18 (Special Issue), Pages: 52-76, https://www.academia.edu/44483311/Niccolo_Machiavelli_and_the_Possibility_of_the_Post_political

Biba, J. & Franěk, J. (2023). Machiavelli and Contemporary Politics, *Theoria* Vol. 70 Iss. 174, No 1, pp. 1-7, March 2023.https://doi.org/10.3167/th.2023.7017401

Chanda, C. (2025). Machiavelli Political Thought, Machiavelli's Impact on Modern Politics, https://www.scribd.com/document/953304855/Machiavelli-Political-Thought

Eder, Anna-Maria A.; Lawler, Insa; van Riel, Raphael. (2020). "Philosophical methods under scrutiny: introduction", Synthese 197: pp. 915–923, publish online https://doi.org/10.1007/s11229-018-02051-2 diakses 30 Maret 2020 dari https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11229-018-02051-2.pdf

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Grazziero, L. (2022). Niccolo Machiavelli (1469-1527), M. Lewis and D. Rose (ed.), *The Bloomsbury Italian Philosophy*, Reader, London, Bloomsbury, 2022, pp. 51-53.

Josh, Denver. (2016). "What is Philosophical Methodology?", The Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Oxford: Oxford University Press, diakses 30 Maret 2021 online edisi 2018 dari www.oxfordhandbooks.com

Kelts, S. A. Kelts, (2023). Machiavelli's Humanity: Differences in the Nature of the People Between The Prince and the Discourses, diakses dari

Machiavelli, N. (1974) [1513]. *The Prince*. Penguinbooks, England-Harmondsworth. Machiavelli, N. (1999). *Il Principe. Sang Penguasa*. Jakarta, Gramedia.

Machiavelli, N. (1996). *Discourses on Livy*. Chicago: University of Chicago Press.

Ménissier, T. (2025). *Corruption, Virtue and Republic in Machiavelli's Work*, Team research Philosophy, Languages & Cognition (EA 3699), Thierry.Menissier@upmf-grenoble.fr

Ross, G. M. (2011). Philosophical Research Method in Education. Manchester: Subject Centre for Philosophical and Religious Studies of the Higher Education Academy. Retrieved from www.philosophy.leeds.ac.uk.

Sayer, D. (2026). *Machiavelli and The True Way on Rome, Religion and Necessiy*, diakses darihttps://www.academia.edu/36414726/Machiavelli_and_the_True_Way_On_Rome_Religion_ and_Necessity?rhid

Sheffield, E. (2004). "Beyond Abstraction: Philosophy as a Practical Qualitative Research Method". The Qualitative Report, 9(4), 760-769. Diakses dari http://www.nova.edu/ssss/QR/QR9-4/sheffield.pdf

Strauss, L. & Cropsey, J. (1987). *History of Polical Philosophy*. Chicago, The University of Chicago Press.

Žagar, D. (2021). A Discourse on Machiavelli's New Rome, *Croatian Political Science Review*, Vol.58, No. 4, 2021, pp. 7-34, https://doi.org/10.20901/pm.58.4.01,